

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang mempunyai semua kekayaan dan merupakan anugerah dari Allah S.W.T dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Negara Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah “Hutan”. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.¹

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik khas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Selain memiliki manfaat, hutan juga memiliki fungsi – fungsi pokok yang menjadi prinsip kelestarian hutan, antara lain fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Sejalan dengan kemajuan kehidupan masyarakat di masa modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan memupuk perubahan proses sosial dalam tatanan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Pasal 1

kehidupan bermasyarakat . Kelangsungan hutan sebagai peyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia telah di manfaatkan oleh untuk kebutuhan proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi.

Sumber daya yang sangat penting terutama kayu tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²

Maka dari itu di dalam kedudukannya, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yaitu hutan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan tersebut merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Selain itu banyaknya jalan untuk masuk ke dalam hutan tersebut menjadi alasan utama. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara illegal.

² Siswanto Sumarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm 6

Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara dihitung dari pendapatan negara dihitung dari kerugian akibat penebangan ilegal ini. Penebangan hutan secara liar ini disebut juga dengan ilegal logging. Menurut Pendapat Haba³, ilegal Logging adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan melalui proses penjualan yang ilegal.

Pengertian ilegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi ilegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*,⁴ ilegal artinya *forbidden by law; unlawful* artinya menurut hukum itu tidak sah atau . Sedangkan *log* didalam bahasa Inggris artinya

³ Utsman Ali, *Pengertian Illegal Logging*, dalam <http://pengertianpakar.com/>, akses 20 Maret 2018

⁴ Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987, hlm. 925.

kayu gelondongan atau batang kayu, dan *logging* artinya membawa ke tempat gergajian serta kegiatan melakukan pemotongan kayu. Telah tercantum di dalam buku *Black's Law Dictionary*,⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Didalam Undang – undang ini memberikan penafsiran berkeaan dengan pembalakan liar adalah segala aktivitas memanfaatkan hasil hutan berupa kayu sebagai kegiatan yang tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka sehingga tidak heran setiap tahunnya Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2015 tercatat 684.000 hektar hilang karena illegal logging⁶, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir

Berikut merupakan tabel laporan kasus yang terjadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara :

⁵ Garner, B.A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, 1999, hlm. 750.

⁶ Hendra Cipto, *Setiap Tahun Hutan Indonesia hilang 684.000 Hektar*, dalam <http://regional.kompas.com//> , akses 20 Maret 2018

Tabel I
Kasus Illegal Logging 2016 - 2018 di Polres Kabupaten Bulungan⁷

No	Tahun	Polres Kabupaten Bulungan	Tempat Kejadian Perkara	Tanggal Kejadian	Objek
1	2016	1 Kasus	Sungai di Kecamatan Sekatak	27 Maret 2016	Kayu jenis Ulin 4 Kubik
2	2017	1 Kasus	Kecamatan Tanjung Palas	16 September 2017	2 Truck Kayu jenis Ulin
3	2018	2 Kasus	1) Muara Batu Pasu 2) Kabupaten Bulungan	1) 20 April 2018 2) 28 April 2018	1) kayu jenis Lembasung 7 Kubik 2) kayu jenis Kruing

Penebangan hutan secara illegal ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja tetapi pada beberapa kasus juga melibatkan korporasi. Modus yang dilakukan oleh korporasi ini adalah dengan cara pemalsuan izin.

Penebangan hutan secara illegal ini terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan orang yang memiliki modal besar maupun korporasi yang bertindak sebagai donatur ataupun pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil penebangan tersebut . Donatur atau pemodal ini terkadang tidak hanya

⁷ Data Kasus Eksus Resor Bulungan tahun 2016 sampai dengan 2018

bertindak sebagai pembeli hasil kayu tersebut melainkan juga menyediakan fasilitas seperti alat berat ataupun keperluan lain yang berkaitan dengan aktivitas penebangan tersebut.

Guna mengantisipasi semakin maraknya terjadi kegiatan illegal logging ini akan menjadi sangat penting apabila untuk melakukan sebuah atau suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum pidana penebangan hutan secara illegal, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan /mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan penebangan liar dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepadanya. Atas dasar itulah pemerintah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagai aturan utama atau main rule dalam tindak pidana penebangan hutan secara illegal ini.

Berdasarkan data kepolisian Kabupaten Bulungan di atas yang dimana setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi kasus penebangan hutan secara illegal inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pelaku Penebangan Hutan Secara Illegal” (Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara)..**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa polisi hutan kesulitan dalam menanggulangi pelaku penebangan hutan secara illegal di Kabupaten Bulungan ?
2. Bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pelaku atau sekelompok orang yang melakukan penebangan hutan secara illegal di Kabupaten Bulungan ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesulitan yang di alami oleh Polisi Hutan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana illegal logging
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

D.1 Manfaat Penulisan

Dengan di selesaikannya penelitian ini maka akan di harapkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian / penulisan tugas akhir ini diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan informasi seputar ilmu hukum tentang Penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal logging Pun demikian manfaat penelitian ini secara subyektif yakni sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan

Studi Strata- 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi konsep bentuk pelaksanaan dan efektifitas berkaitan dengan masalah yang mengenai penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal logging dan menanggulangi agar penebangan hutan secara illegal dapat berkurang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu menjadi literatur untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal logging, selain itu pula dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih menjaga kelestarian alam sekitar.

D.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada khususnya, terkait Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penebangan Hutan secara Ilegal penjatuhan sanksi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah Penelitian lapangan yang termasuk didalam jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji apa yang telah

terjadi di masyarakat sesuai dengan fakta di lapangan dan bagaimana ketentuan hukum telah berjalan .⁸ Atau dapat juga dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang telah terjadi di lingkungan masyarakat terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang nantinya bertujuan untuk mengetahui data atau sampel yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian dan nantinya akan tertuju pada penyelesaian sebuah masalah tersebut.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah melakukan penelitian atau mengambil data langsung ke lapangan yang menitikberatkan untuk tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata yaitu mengetahui penegakan sanksi pidana hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah hukum kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15

⁹ Ibid. hlm 16

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 51.

3. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Dinas Kehutanan atau instansi yang terkait mengenai kehutanan yang ada di Kabupaten Bulungan.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹² Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .hlm. 30.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm 56.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

1) Wawancara

Wawancara adalah ketika seseorang yaitu pewawancara memberikan pertanyaan yang telah di buat untuk mendapatkan jawaban – jawaban yang di butuhkan dalam sebuah peneltian kepada narasumber yang di lakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan narasumber.¹⁴

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung kepada Bapak Maryanto selaku sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.¹⁵ Wawancara bertujuan yaitu mendapatkan informasi yang relevan dari narasumber yang sangat kompeten dalam kaitannya dengan masalah penelitian yang peroleh secara langsung dari lisan narasumber.¹⁶

¹⁴ Amiruddin, Op.cit, hlm 82

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm 167-168.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 95.

2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁷

3) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data melalui tulisan terdahulu dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti di perlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan atau di perlukan.

5. Analisis Data

Dalam Penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik analisa dengan menyatukan data primer dan data sekunder yang telah di dapatkan ketika melakukan peneltian terhadap obyek penelitian dan setelah itu di analisan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Seluruh penelitian kualitatif mempunyai kecenderungan yang dimana memberikan sebuah gambaran jelas tentang sebuah permasalahan yang di peroleh dari mengambil data yang akurat di lapangan obyek penelitian sehingga membuat suatu kejelasan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat lalu di sajikan dengan cara pandang penulis tentang permasalahan yang di angkat oleh penulis.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 71

E. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian karya ilmiah sesuai dengan aturan baru dalam penelitian ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum. Adapun sistematika penelitian hukum terbagi dalam 4 (empat) bab. Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II memberikan mengenai penjelasan yang berkaitan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang di pakai atau di gunakan dalam meneliti objek penelitian. Teori dan konsep yang digunakan dalam peneltian ini .

Efektivitas Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penebangan secara Illegal, Pengaturan Penebangan Hutan secara Illegal dalam Peraturan Perundang – undangan di Indonesia, serta Sanksi Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara illegal dan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya berisi mengenai Kesulitan yang di alami para polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Bulungan dan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku atau sekelompok orang yang melakukan illegal logging di Kabupaten Bulungan

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang penulis berikan. Kesimpulan merupakan rangkuman atau inti yang di anggap penting guna menjawab permasalahan yang telah di analisa serta di simpulkan pada bagian sebelumnya terhadap obyek yang telah di teliti oleh peneliti dalam menjawab suatu persoalan yang terjadi di lapangan.